

(Rochman Natawidjaja, 1986: 1). Banyak yang mengeluh bahwa konselor "tidak siap pakai" (Munandir, 1986: 2). Lebih jauh lagi kecaman ini, oleh sebagian orang, dilanjutkan dengan kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling tidak diperlukan di sekolah. Pada waktu kecaman-kecaman itu masih gencar-gencarnya dilontarkan "kebetulan" muncul kebijakan penutupan program studi bimbingan dan konseling di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Pihak pengkritik seolah-olah mendapat angin. Makin suramlah citra bimbingan di sekolah.

Jika disepakati bahwa keadaan seperti digambarkan di atas merupakan bukti ketidakberhasilgunaan bimbingan dan konseling di sekolah, maka menjadi perlulah ditelusuri apa penyebabnya. Tanpa maksud berapologi, keberadaan Bimbingan dan Konseling yang sedemikian itu tidaklah sepenuhnya disebabkan oleh faktor konselor semata. Sebagiannya disebabkan oleh masih adanya kesimpangsiuran dan kesalahpahaman pihak pengguna akan fungsi bimbingan dan konseling di sekolah (Munandir, 1986: 2; Rochman Natawidjaja, 1986: 3). Ini menggejala dari banyaknya harapan-harapan yang tidak realistis kepada konselor, banyaknya tugas-tugas yang sebenarnya berada di luar kewenangan konselor, tugas-tugas marginal, dan bahkan tidak jarang tugas-tugas yang bertentangan dengan fungsi bimbingan dan konseling. Dengan harapan-harapan yang tidak realistis dan tugas-tugas yang sedemikian itu wajarlah jika konselor tidak berdaya dan berhasil guna. Sekedar sebagai perbandingan, keadaan semacam itu pulalah yang menjadi salah satu

penyebab utama ketidakberhasilan konselor sekolah di Amerika pada tahun 1970 hingga 1980-an (Bradley, 1978:42; Nugent, 1981:106).

Faktor selanjutnya yang menyebabkan ketidakberhasilan bimbingan dan konseling di sekolah adalah berkenaan dengan kualifikasi petugas yang menangani bimbingan dan konseling di sekolah. Petugas bimbingan dan konseling di sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua jika dilihat dari penyiapannya: (1) petugas yang mulanya adalah guru bidang studi yang mendapat pelatihan (*training*) melalui penataran-penataran; dan (2) petugas yang disiapkan menjadi konselor melalui pendidikan prajabatan. Kelompok pertama erat kaitannya dengan kebutuhan akan petugas bimbingan dan konseling dalam jumlah besar sejak diterimanya program bimbingan dan konseling secara resmi di sekolah menengah pada tahun 1975. Dipandang dari kriteria profesional sudah barang tentu pengetahuan dan keterampilan petugas-petugas ini masih jauh dari memadai. Kesulitan menjadi muncul karena tidak ada deskripsi yang jelas mengenai perbedaan fungsi guru-guru bimbingan dan konseling ini dengan konselor. Bahkan dalam kehidupan di sekolah keduanya mendapat sebutan yang sama yakni guru BP. Mana unjuk kerja guru BP dan mana unjuk kerja konselor menjadi kabur. Dalam kekaburan inilah citra bimbingan dan konseling terbentuk. Kekaburan ini terus berlanjut hingga sekarang. Pemikiran kearah penegasan kategori petugas bimbingan di sekolah baru muncul akhir-akhir ini sebagaimana diajukan oleh Rochman Natawidjaja (1989; 8).

Uraian di atas tidak bermaksud menyatakan bahwa petugas

bimbingan dan konseling yang telah mengalami pendidikan khusus, yakni konselor, tidak ikut mempengaruhi suramnya citra bimbingan dan konseling di sekolah. Hampir merata kecaman kepada bimbingan dan konseling merupakan isyarat bahwa konselor pun belum berfungsi seperti yang diharapkan. Belum banyak bukti -- seandainya ada -- bahwa konselor sekolah telah menunjukkan keberhasilgunaannya di sekolah, bahkan banyak kepala sekolah mengeluh bahwa konselor tidak siap pakai.

Usaha untuk menunjukkan hasil kerja konselor sekolah semakin pelik karena sampai sekarang belum dirumuskan tolok ukur keberhasilan program bimbingan dan konseling di sekolah. Dan ini merupakan problema klasik dalam dunia bimbingan dan konseling, termasuk juga di negara asal konseling yakni Amerika. Bagaimana mungkin program bimbingan dan konseling dapat dikatakan berhasil atau gagal jika tidak ada tolok ukurnya? Sampai sekarang, belum dijumpai sebuah rumusan yang memuaskan untuk dijadikan tolok ukur itu.

Tentu saja masih ada faktor-faktor tambahan lain yang ikut memberikan urunan bagi kekurangberhasilan pelaksanaan bimbingan di sekolah, namun dengan adanya faktor-faktor yang menonjol seperti dikemukakan di atas cukuplah untuk menjadikan bimbingan seperti keadaannya yang sekarang ini.

Dengan citra pelaksana bimbingan yang sedemikian, maka usaha untuk menerangkan pentingnya bimbingan yang diselenggarakan oleh petugas khusus menjadi tidak berjalan lancar. Dampaknya, tidak

banyak orang-orang di luar bimbingan dan konseling yang memahami apa sebenarnya maksud hakiki eksistensi konselor di sekolah. Berikut ini diuraikan maksud hakiki eksistensi konselor.

## 2. Rasionel Pentingnya Konselor di Sekolah

Untuk memahami peranan konselor sekolah, perlu diamati dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sebab pada dasarnya keberadaan konselor merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan tersebut. Karena pendidikan persekolahan ada dalam kerangka Pendidikan Nasional, maka menjadi perlulah dilihat terlebih dahulu eksistensi bimbingan dalam kerangka Pendidikan Nasional itu.

### a. Bimbingan sebagai komponen esensial dalam pendidikan

Tujuan Pendidikan Nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan (UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional) pasal 4, adalah sebagai berikut.

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kenasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam rumusan tujuan di atas dengan tegas tersurat bahwa Pendidikan Nasional bertujuan *mengembangkan* manusia Indonesia seutuhnya. Dengan demikian inti pokok upaya pendidikan nasional adalah membawa manusia Indonesia --untuk di sekolah adalah siswa-- mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi dalam semua aspek kepribadiannya. Secara tersirat rumusan itu menunjukkan

bahwa semua karakteristik manusia Indonesia dicapai melalui proses perkembangan.

Tidak akan diragukan bahwa setiap manusia memiliki keunikan masing-masing, sehingga proses perkembangan yang dialaminya pun akan bersifat unik, bersifat individual. Ini mengandung arti bahwa proses pendidikan dialami siswa secara individual. Implikasi logisnya, proses pendidikan yang bersifat umum harus dapat menyentuh dunia kehidupan individual siswa (Sunaryo, 1988). Hanya dalam kondisi yang sedemikian itulah siswa akan dapat menginternalisasi dan mengintegrasikan sistem nilai dan perilaku yang dipelajari melalui proses pendidikan yang bersifat umum.

Upaya pendidikan yang memusatkan kehirauan utamanya pada kehidupan individual adalah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling menitikberatkan perhatian dan kegiatannya pada proses membantu individu sehingga individu tersebut dapat menjalani tahap maju perkembangannya seoptimal mungkin dalam rangka menjadi manusia seutuhnya. Secara demikian, bimbingan membawa siswa mencapai tingkat perkembangan secara bermakna.

Uraian di atas menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan tuntutan logis dari upaya mencapai Tujuan Pendidikan Nasional. Dengan mengamati secara konseptual-filosofis akan tampak bahwa eksistensi bimbingan dalam pendidikan pada dasarnya memiliki landasan yuridis-konstitusional. Maka jika pendidikan di sekolah, juga di luar sekolah, hendak ajeg terhadap Tujuan Pendidikan Nasional, adanya bimbingan pendidikan merupakan

keniscayaan.

b. *Fenomena proses pendidikan di sekolah yang menuntut adanya konselor*

Alih-alih berangkat dari uraian konseptual-teoritis, uraian berikut ini mengamati proses belajar siswa secara aktual untuk dilihat kaitannya dengan kebutuhan akan adanya konselor profesional.

Aktivitas utama siswa di sekolah adalah belajar, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun motorik. Sebagian terbesar dari kegiatan belajar siswa dilakukan dalam interaksinya dengan guru.

Dalam interaksi siswa-guru terlihat adanya aspek-aspek yang mudah diamati dengan jelas: (1) tujuan belajar, bahan ajaran, dan kegiatan-kegiatan pokok yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan belajar itu telah ditetapkan; (2) sebagian terbesar kegiatan belajar siswa dilakukan dalam situasi kelompok secara klasikal, dengan guru sebagai pengelola utamanya; (3) siswa juga mendapat bantuan individual dari guru dalam kesulitan-kesulitan belajar dan kesulitan-kesulitan pribadi-sosial tertentu, serta beberapa aspek bimbingan karir; (4) dalam aspek sosial, siswa diharapkan memandang guru sebagai wakil masyarakat (*representative of society*), utamanya dalam hal moral dan norma-norma masyarakat. Bahwa aspek-aspek ini memegang peranan penting bagi belajar siswa, khususnya dalam perkembangan intelektual dan sosialisasi, jelas tidak diragukan sehingga menjadi berlebihan jika diurai di sini. Yang perlu mendapat perhatian serius adalah keterbatasan-keterbatasan kegiatan

tersebut bagi perkembangan kepribadian siswa dalam semua aspeknya seperti yang dikehendaki tujuan Pendidikan Nasional.

Manusia yang bertanggung jawab dan mandiri serta berkepribadian mantap menunjukkan karakteristik mampu mengarahkan diri sendiri secara optimal. Dalam kegiatan siswa seperti digambarkan pada butir pertama paragraf di atas tampak bahwa siswa tidak belajar mengarahkan diri sendiri. Pendidikan yang bersifat umum, khususnya pengajaran, tidak menjangkau kebutuhan siswa untuk mengembangkan kemampuan mengarahkan diri. Tentu saja pengembangan kemampuan mengarahkan diri ini membutuhkan proses yang panjang dan akan dapat diperlancar jika siswa mendapatkan layanan khusus yang memang dirancang untuk itu. Untuk itu diperlukan konselor profesional yang mampu menerapkan proses bimbingan sebagai bantuan individual kepada siswa untuk mengarahkan diri secara optimal. Proses ini akan tepat jika dilakukan oleh konselor bukan saja karena kompetensi konselor memang menuju ke sana, namun juga karena sifat-sifat pendekatan bimbingan berbeda dengan pengajaran sehingga banyak aspek-aspek bimbingan yang sulit dilakukan oleh guru.

Kebiasaan siswa berinteraksi dengan guru di kelas dan peranan guru sebagai *representative of society* makin menunjukkan perlunya konselor. Sifat-sifat kelas menghendaki siswa untuk berperilaku relatif seragam dengan kelompoknya seperti yang dikehendaki guru. Kebiasaan ini mengkondisi siswa juga akan berperilaku seperti yang diharapkan guru ketika di luar kelas, termasuk ketika berhubungan secara pribadi. Padahal untuk memahami keindividualannya siswa

perlu dibantu menyadari, mengenali, dan mengarahkan diri sesuai dengan keunikannya. Dalam hal ini konselor tidak menemui kendala itu. Berbagai permasalahan belajar, pribadi, sosial, dan masalah berkenaan dengan masa depannya, dapat dipastikan akan dijumpai oleh banyak siswa. Bantuan yang tidak memadai, apalagi jika tidak tersedia bantuan bagi siswa untuk menghadapi permasalahannya, bukan saja dapat menghambat prestasi belajar siswa secara optimal tapi juga akan menghambat perkembangan kepribadiannya pada umumnya.

Dalam masalah-masalah belajar, khususnya yang berkenaan dengan pengajaran, bimbingan guru secara individual akan sangat membantu siswa. Tentu saja akan dijumpai siswa-siswa yang mengalami hambatan belajar bukan karena pengajaran. Berbagai kesulitan pribadi-sosial akan jalin menjalin sedemikian sehingga menghambat belajar siswa. Peranan guru sebagai *representative of society* akan menjadi kendala utama bagi siswa -- juga bagi guru -- untuk meminta bantuan dalam masalah-masalah yang tidak sejalan dengan peranan guru itu. Dengan adanya konselor maka siswa memiliki tempat untuk mengajukan berbagai permasalahannya.

Adanya konselor sebagai pembantu siswa menghadapi berbagai permasalahannya melalui konseling akan menjadi semakin penting, tidak sekedar karena konselor memiliki kompetensi untuk membantu siswa dalam berbagai permasalahan yang berada di luar kompetensi guru, namun juga karena hakiki konseling bagi perkembangan siswa. Dengan konseling yang berlaras bimbingan sebagai proses bantuan pertumbuhan pribadi, siswa dibantu untuk menjadi *problem solver*



bagi masalah-masalahnya. Di samping mengatasi masalahnya, melalui konseling yang diselenggarakan oleh konselor yang kompeten, siswa mengalami pertumbuhkembangan kepribadian dalam rangka mencapai kemandiriannya.

Telah disebutkan di atas bahwa guru juga melaksanakan aspek-aspek tertentu dari bimbingan karir, misalnya memberikan beberapa informasi karir. Dalam masyarakat modern dimana tuntutan spesialisasi demikian tingginya, bimbingan karir tidak bisa sekedar dengan memberikan informasi pendidikan tinggi dan pekerjaan saja. Persoalan karir erat kaitannya dengan berhasil tidaknya siswa di masa depan sehingga membutuhkan spesialis yang kompeten untuk menyelenggarakannya. Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 pasal 15 disebutkan bahwa salah satu tugas penyelenggaraan pendidikan menengah adalah agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Bagi siswa SMA, pengembangan kemampuan tersebut erat kaitannya dengan kemampuan merencanakan pendidikan tinggi yang akan dimasukinya atau dunia kerja yang akan diterjuninya.

Bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikannya, agar dapat mencapai hasil yang optimal, bukan saja perlu mendapatkan informasi yang luas tentang perguruan tinggi, tapi juga informasi potensi-potensinya sehingga dapat melakukan pilihan yang sesuai. Ada siswa-siswa yang meskipun telah memiliki informasi yang memadai tapi mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, baik karena faktor pribadi maupun karena faktor di luar dirinya, misalnya faktor orang

tua. Oleh karena itu di samping membutuhkan bimbingan karir, konseling karir juga dibutuhkan siswa.

Bagi siswa SMA yang akan putus sekolah, persoalannya lebih pelik lagi. Di satu sisi mereka tidak dipersiapkan menjadi tenaga terampil dalam satu bidang tertentu, di sisi lain persaingan kerja demikian ketatnya. Oleh karena itu informasi dunia kerja, termasuk pusat-pusat latihan kerja, amat mereka perlukan. Pemahaman diri, khususnya dalam hal potensi-potensi, juga amat mereka perlukan sehingga memungkinkan mereka menemukan pilihan-pilihan kerja yang barangkali sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Tidak kecil kemungkinan di sekolah dijumpai siswa-siswa yang pesimis bahkan frustrasi terhadap masa depannya karena sulitnya mencari kerja sehingga melemahkan semangat belajarnya. Konseling yang sensitif terhadap siswa yang sedemikian akan amat dibutuhkan oleh siswa.

Uraian-uraian di atas menunjukkan pentingnya bimbingan dan konseling karir baik bagi siswa yang akan melanjutkan ataupun yang akan putus sekolah. Bantuan ini akan makin terlihat pentingnya jika diingat bahwa perencanaan dan keputusan karir siswa akan menentukan masa depannya.

Kebutuhan siswa akan bantuan tak langsung. Pergeseran norma-norma di masyarakat, khususnya di kalangan remaja, dapat menimbulkan konflik antara siswa dengan orang tua, guru, ataupun kepala sekolah. Adanya konsultan di sekolah yang memahami remaja dan permasalahannya akan membantu orang tua, guru, dan kepala sekolah untuk memahami remaja secara lebih baik sehingga dapat

berinteraksi secara lebih baik pula. Konselor mampu menjadi konsultan tersebut.

Dari uraian-uraian di atas, dapat ditarik pengertian-pengertian sebagai berikut :

1). Bimbingan dan konseling merupakan komponen sistem pendidikan yang esensial bagi pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan Nasional menyiratkan secara filosofis-konseptual landasan yuridis-konstitusional bimbingan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

2). Dilihat dari dimensi *pasif*-nya, bimbingan merupakan konstelasi layanan yang masing-masing membutuhkan kompetensi dan pendekatan yang khas. Kompetensi dan kekhasan tersebut menuntut adanya konselor-konselor profesional di sekolah.

3). Dilihat dari dimensi *aktif*-nya, bimbingan adalah proses bantuan individual kepada siswa agar mampu memahami diri, mengatasi berbagai permasalahan, dan akhirnya mampu mengarahkan diri. Rangkaian layanan itu hanya akan dapat mencapai maksud utamanya jika ditangani oleh spesialis yang memang ahli dalam hal itu, yakni konselor. Tanpa adanya spesialis tersebut besar kemungkinan layanan-layanan itu akan menjadi terpisah-pisah sehingga tidak mendekati maksud utama penyelenggaraannya.

### c. Aspek Budaya Sebagai Landasan Profil Konselor

Telah diuraikan di atas bahwa bimbingan merupakan salah satu komponen esensial dalam pendidikan sehingga penyelenggaraannya

membutuhkan konselor yang benar-benar andal. Bimbingan dan konseling, yang kehirauan utamanya dipusatkan pada eksistensi siswa sebagai manusia, mendasarkan pencapaian tujuannya melalui interaksi konselor-siswa yang kondusif. Interaksi tersebut haruslah diletakkan dalam konteks budaya Indonesia. Secara demikian pendekatan konselor terhadap siswa dapat dipertanggungjawabkan secara kultural.

Dilihat dari salah satu azas pendidikan yang hidup dalam falsafah pendidikan kita, yakni azas *Tut Wuri Handayani*, tampak kegayutan konsep bimbingan terhadap azas tersebut. Sebenarnya bimbingan dapat menerjemahkan azas tersebut dalam pendidikan di sekolah, sehingga benar-benar membantu siswa mewujudkan potensinya sebagai manusia mengarah ke Tujuan Pendidikan Nasional. Tentu saja banyak prakondisi yang diperlukan terwujudnya bimbingan berkonteks budaya itu, lebih-lebih dalam pendidikan di sekolah yang bersifat massal. Salah satu prakondisi tersebut adalah konselor. Karakteristik pribadi-sosial dan kecakapan-kecakapan profesional apa yang perlu dimiliki oleh konselor dalam kerangka menerjemahkan azas *Tut Wuri Handayani* itu? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan sangat membantu dalam mendidik konselor yang berlandas budaya itu.

### 3. *Kebutuhan akan Pengembangan Program Pendidikan Konselor.*

Program pendidikan konselor sekolah yang telah ada selama ini dilaksanakan di jenjang Strata Nol dan Strata Satu. Sebagian besarnya diadakan di Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan atau

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sebagian lagi disiapkan oleh Fakultas Psikologi di Universitas pada Jurusan Psikologi Bimbingan dan Penyuluhan, misalnya di Universitas Gajah Mada. Di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) usaha pengembangan program telah pernah dilakukan, yakni pada tahun 1982, dengan mengadakan penyempurnaan kurikulum. Adapun jenjang pendidikan yang digunakan adalah jenjang S03 dan S1 (Pedoman Pelaksana Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia, Suplemen ~ Buku II tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tenaga Kependidikan Program S03 dan S1, Bidang Studi Bimbingan Konseling, 1982). Dalam sub bab Latar Belakang pedoman tersebut disebutkan bahwa tujuan penyempurnaan kurikulum tersebut salah satunya adalah menjawab tantangan berupa kecaman bahwa bimbingan sekolah kurang berfungsi dan petugasnya kurang mampu bekerja (h.1).

Jika kecaman itu dijadikan tolok ukur keberhasilan konselor sekolah maka akan segera tampaklah bahwa setelah tujuh tahun penyempurnaan kurikulum itu dilakukan, kecaman terhadap bimbingan di sekolah tidak banyak berkurang.

Kenyataan di atas menampakkan bahwa usaha pengembangan program pendidikan konselor belum sepenuhnya memberikan hasil seperti yang diharapkan. Terlihat bahwa masih dibutuhkan pengembangan lebih jauh lagi. Permasalahannya ialah: *Program pendidikan prajabatan seperti apakah yang perlu dikembangkan untuk menyiapkan konselor sekolah ?* Pertanyaan inilah yang akan menjadi tema penelitian.

Pengalaman di tahun 1982 di atas menunjukkan bahwa harapan pihak pengguna belum banyak terpenuhi. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan program dalam penelitian ini maka pengguna, yakni kepala sekolah, ikut dilibatkan.

Pihak lain yang dilibatkan dalam rangka mendapatkan gambaran sosok konselor yang diharapkan adalah pakar pendidikan, pendidik calon konselor, dan konselor yang telah bertugas di lapangan. Gambaran sosok atau profil konselor yang diharapkan inilah yang akan ditelaah dalam rangka pengembangan program pendidikan konselor sekolah. Oleh karena itu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui studi empiris dalam penelitian ini adalah : *Profil konselor seperti apakah yang diharapkan oleh pakar pendidikan, pendidik konselor, kepala sekolah, dan konselor sekolah ?* Dengan temuan empiris inilah program pendidikan konselor sekolah dikembangkan.

## B. Konselor SMA Sebagai Fokus Studi.

Berikut ini diuraikan pemikiran mengapa studi difokuskan pada konselor SMA, dan beberapa batasan istilah dalam judul penelitian.

### 1. *Dasar Pemikiran Pemfokusan Studi.*

Disadari benar bahwa dalam pendidikan persekolahan di setiap jenjang dibutuhkan bimbingan dan konseling yang ditangani oleh konselor-konselor profesional. Dipilihnya konselor SMA sebagai fokus studi didasarkan pada alasan-alasan yang berkenaan dengan siswa SMA sebagai subyek penerima layanan dan alasan-alasan

strategis.

Siswa SMA merupakan kelompok remaja atau adolesen. Para pakar psikologi perkembangan menegaskan bahwa masa remaja merupakan masa perkembangan yang sulit bagi individu (Wrenn, 1962:5). Kondisi mereka yang bukan lagi kanak-kanak dan bukan pula orang dewasa memungkinkan timbulnya berbagai konflik diri dan sosial. Havighurst dengan teori tugas perkembangannya menjelaskan bahwa remaja memiliki tugas-tugas : mencapai identitas diri, kemandirian emosional, mengembangkan relasi sosial yang lebih matang, dan menyiapkan diri untuk memasuki dunia karir (Herr dan Craner, 1984:178). Jika remaja dapat menjalani tugas perkembangannya dengan baik, mereka akan berbahagia dan siap untuk menjalani tugas perkembangan berikutnya. Jika tidak, remaja akan banyak menemui kesulitan emosional dan akan banyak mengalami gangguan pada tahap perkembangan berikutnya. Dua kemungkinan ini dikenal dengan konsep masa kritis, *critical period*, dari Erikson (Bischof, 1970:579; Corey, 1982:49). Siswa SMA sebagai remaja amat membutuhkan bantuan pribadi untuk menjalani tugas perkembangannya, atau masa krisis.

Sehubungan dengan tugas perkembangan tersebut diatas, siswa SMA akan menghadapi berbagai permasalahan. Shertzer/ Stone (1981:2-25) setelah mengupas berbagai konsep pakar tentang remaja, mengemukakan masalah-masalah umum yang dihadapi remaja adalah : masalah-masalah transisi, identitas diri, ekonomis, sosial, dan pribadi. Klasifikasi ini teoritis belaka sifatnya. Sesuai dengan prinsip psikologi bahwa setiap individu berbeda-beda (Glanz,

1964:53) dapat dipastikan bahwa siswa SMA akan memiliki berbagai variasi dan nuansa permasalahan, termasuk juga pemecahannya. Oleh karenanya siswa membutuhkan spesialis yang andal dalam membantu mereka secara pribadi. Konselor yang andal menjanjikan bantuan itu.

Alasan kedua, adalah alasan-alasan strategis. Bimbingan dan konseling di sekolah diprediksi akan makin terspesialisasi. Pengamatan pada profesi lain yang lebih tua, misalnya kedokteran, menunjukkan adanya spesialisasi yang makin tajam dari waktu ke waktu. Pengamatan ini cenderung membawa kepada prediksi bahwa profesi bimbingan pun akan makin terspesialisasi, sehingga akan ada konselor khusus SD, SMP, SMA dan PT. Perbandingan ke negara asal bimbingan dan konseling, Amerika, menyokong prediksi ini.

## 2. Batasan Istilah.

Istilah profil dalam penelitian ini mengacu pada *Longman Dictionary of Contemporary English* yang mencantumkan salah satu pengertian *profile* adalah "...a short description, esp. of person's life and character." (1978:875). *Person* dalam penelitian ini ialah konselor SMA. Istilah konselor digunakan untuk menunjuk secara lebih tegas kepada petugas profesional bimbingan dan penyuluhan (konseling). Dalam hal profil konselor, dikenal tiga macam profil, yakni: profil ideal (*ideal profile*), profil yang diharapkan (*expected profile*) dan profil aktual (Rochman Natawidjaya, 1989). Penelitian ini mengacu pada profil kedua,



yakni profil yang diharapkan (*expected profile*).

Berangkat dari uraian di atas maka istilah Profil Konselor SMA dibatasi sebagai berikut : *deskripsi ciri-ciri/karakteristik pribadi-sosial-profesional yang diharapkan dimiliki konselor (petugas profesional bimbingan dan konseling) Sekolah Menengah Atas.*

Istilah pokok lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengembangan Program Pendidikan Konselor SMA. Pengembangan yang dimaksud ini khusus mengacu pada pengembangan isi program, yakni kurikulum. Dengan demikian, program pendidikan dalam penelitian ini dibatasi pada kurikulum pendidikan konselor SMA.

### C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Masalah utama yang menjadi tema penelitian ini berkenaan dengan program pendidikan konselor SMA. Masalah utama tersebut dirumuskan sebagai berikut: *Program Pendidikan Prajabatan seperti apakah yang perlu dikembangkan untuk mendidik konselor SMA ?*

Masalah ini mendesak untuk ditemukan pemecahannya sebab pengalaman selama ini menggiring pada kesimpulan sementara bahwa program pendidikan prajabatan yang ada, baik pada jenjang Strata Nol maupun Strata Satu, kurang menunjukkan keberhasilgunaan.

Disadari bahwa jawaban untuk permasalahan di atas bersifat komprehensif dan memerlukan atau melibatkan banyak pihak. Penelitian ini tidak hendak merengkuh keseluruhan jawaban tersebut, namun dikhususkan pada isi program.

Untuk mendapatkan isi proram, ditempuh langkah-langkah penelitian: penemuan profil konselor SMA yang diharapkan, kategorisasi sumber perolehan profil, dan penyusunan standar isi program pendidikan SMA. Langkah-langkah ini dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian seperti berikut:

1. Profil atau karakteristik pribadi-sosial-profesional seperti apakah yang diharapkan dimiliki konselor SMA, menurut pakar pendidikan, pendidik konselor, kepala SMA, dan konselor SMA?

2. Di antara profil/karakteristik yang diharapkan dimiliki konselor SMA, karakteristik mana yang diperoleh: (a) sebelum mengikuti pendidikan prajabatan (b) melalui pendidikan prajabatan, dan (c) melalui pengalaman menjalankan tugas di SMA?

3. Standar program seperti apakah yang perlu dikembangkan untuk mendidik konselor SMA?

Pertanyaan penelitian pertama dan kedua akan dijawab melalui studi empiris, dengan melibatkan pakar pendidikan, pendidik konselor, kepala SMA, dan konselor SMA. Pihak pakar dan pendidik perlu diketahui harapannya karena diduga merekalah yang lebih mengetahui karakteristik konselor secara konseptual teoritis. Pihak kepala sekolah sebagai pihak pengguna konselor di SMA perlu diketahui harapannya karena merekalah yang memiliki kewenangan utama di SMA. Sedangkan pihak konselor SMA diduga akan memberikan masukan berdasarkan pengalamannya selama menjalankan tugas. Secara demikian, profil yang diperoleh merupakan konsensus empiris.

Untuk pertanyaan penelitian ketiga akan didekati melalui

studi terhadap pemikiran-pemikiran konseptual dan standar-standar pendidikan konselor yang ada, dengan didasarkan pada telaahan terhadap hasil penelitian empiris pada pertanyaan penelitian pertama dan kedua. Dengan kata lain, pengembangan standar isi program pendidikan konselor SMA dalam penelitian ini merupakan paduan empiris-teoritis.

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah mengembangkan program pendidikan konselor SMA. Tujuan umum ini didekati melalui tujuan-tujuan spesifik sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan karakteristik pribadi-sosial-profesional konselor SMA yang diharapkan oleh pakar pendidikan, pendidik konselor, kepala SMA, dan konselor SMA.
2. Mengklasifikasikan sumber perolehan karakteristik yang diharapkan itu, berdasarkan penilaian pakar pendidikan, pendidik konselor, kepala SMA, dan konselor SMA.
3. Menyusun standar isi program pendidikan konselor SMA.

#### E. Asumsi Penelitian

Penelitian ini diselenggarakan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut. Pertama, keberadaan dan keberhasilan bimbingan di SMA ditentukan oleh banyak faktor, dan faktor konselor merupakan penentu utama. Banyaknya faktor penentu ini telah diidentifikasi oleh Miller dkk. (1978:151), yaitu antara lain: sikap

administrator, guru, siswa, orang tua dan masyarakat; besar kecilnya sekolah; rasio konselor-siswa; konselor; pendidik konselor; departemen pendidikan; dll. Bahwa konselor merupakan penentu utama karena konselorlah yang menjadi pelaku utama bimbingan konseling di sekolah.

Kedua, ada seperangkat karakteristik, potensial maupun aktual, yang akan menentukan keberhasilan konselor SMA yang dapat diidentifikasi. Di negara lain, misalnya Amerika, studi mengenai karakteristik konselor ideal dan efektif telah lama dilakukan, dan telah menghasilkan pernyataan-pernyataan mengenai karakteristik konselor ideal dan efektif itu. Dengan perbandingan tersebut, asumsi kedua penelitian ini diajukan.

Ketiga, perolehan konselor akan karakteristik yang diharapkan itu merupakan proses jenjang berdasarkan prinsip konvergensi dalam pendidikan. Proses tersebut bermula sejak sebelum konselor mengikuti pendidikan prajabatan, selama pendidikan prajabatan, dan berlanjut melalui pengalaman-pengalaman menjalankan tugas di SMA.

Keempat, program pendidikan konselor dirancang secara sistematis, dengan pendekatan teoritis-empiris, akan sangat membantu calon konselor untuk menumbuh-kembangkan kompetensi pribadi-sosial-profesional yang diperlukan untuk menjadi konselor SMA yang berhasil dan berdaya guna.

#### **F. Pentingnya Penelitian**

Bahwa penelitian mengenai profil konselor merupakan hal

penting dalam bimbingan dan konseling, telah banyak diakui oleh pakar-pakar disiplin ini (Shertzer/Stone, 1972:92; 1981:131). Penjelasan yang cukup gamblang mengapa studi mengenai profil konselor menjadi tema yang paling menarik dalam teori dan praktek konseling telah dikemukakan oleh Belkin (1975:97). Beberapa alasan pentingnya ditemukan profil konselor adalah sebagai berikut:

1. Membantu kita secara lebih baik dalam memahami berbagai faktor yang menentukan keberhasilan bimbingan dan konseling di SMA, dalam hal ini dari sisi konselor.
2. Berguna bagi lembaga pendidikan konselor dalam membuat keputusan berkenaan dengan seleksi dan sistem pembelajaran calon konselor.
3. Memberikan inspirasi bagi konselor-konselor SMA yang telah bertugas di lapangan dalam mengembangkan diri.
4. Berguna bagi pihak yang berwenang meningkatkan kualifikasi konselor SMA dalam membuat program pendidikan dalam jabatan.
5. Mendorong calon konselor untuk mencapainya.
6. Berguna bagi para peneliti sebagai sumber inspirasi untuk menemukan tema-tema penelitian maupun sebagai dasar pengembangan instrumen penelitian.

Pada akhirnya penelitian ini akan menghasilkan standar isi program pendidikan konselor SMA. Hasil ini amat berguna bagi lembaga-lembaga pendidikan konselor dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan sebagai pengambil keputusan dalam pendidikan konselor SMA. Bagi pendidik konselor penelitian ini memberikan masukan untuk

memperbaiki dan mengembangkan sistem pembelajarannya, termasuk di dalamnya perumusan tujuan belajar, ranah-ranah kemampuan yang perlu ditumbuh-kembangkan, material-material yang seyogyanya disediakan, dan seterusnya. Bagi lembaga pendidikan dan pihak pengambil keputusan, penelitian ini memberikan masukan berkenaan dengan persyaratan mengikuti pendidikan, sistem seleksi mahasiswa baru, dan arah umum program pembelajaran. Di samping itu, standar program hasil penelitian dapat digunakan sebagai alat evaluasi terhadap program-program pendidikan konselor SMA yang ada.

